

POHON KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JENEPONTO
MISI 2

MEWUJUDKAN PERADABAN BIROKRASI MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, ASPIRATIF, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN

Tujuan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indikator	Indeks Pelayanan Publik

Sasaran 1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Indikator	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk

Program	Pendaftaran Penduduk
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga ➢ Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ➢ Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Sasaran 2	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
Indikator	Persentase penduduk Yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil

Program	Pencatatan Sipil
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran ➢ Persentase Penerbitan Akta Kematian

Sasaran 3	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk

Program	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase Ketersediaan Data Base Kependudukan

Program	Pengelolaan Profil Kependudukan
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase Ketersediaan Profil Penduduk dan Catatan Sipil

MISI 2

MEWUJUDKAN PERADABAN BIROKRASI MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, ASPIRATIF, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN

Tujuan	Meningkatkan Pelayanan Publik
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Indikator	<ul style="list-style-type: none">➢ Persentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya➢ Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah➢ Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

